

Hubungan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus Pada BPS Kabupaten Jombang

Alfiary Fradana Mellenio

Program Study Akuntansi, STIE PGRI Dewantara, Jombang, Indonesia

Koresponden: 1962093@stiedewantara.ac.id

Citation: Mellenio, A.F. (2021). Hubungan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus Pada BPS Kabupaten Jombang. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(2), 191-200.
<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/75>

Received: 13 Januari 2022
Accepted: 30 Januari 2022
Published: 28 Februari 2022

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

This research was conducted at Badan Pusat Statistik (BPS) of Jombang Regency, where according to the Statistical Law No. 16 of 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) is tasked with organizing integrated national statistics in order to realize a reliable, effective and efficient National Statistics System. To carry out tasks and functions in the regions, BPS establishes BPS Representative Offices in each Province and Regency/City which are vertical agencies. This research is descriptive qualitative research with a case study approach. This study aims to analyze the effect of Good Corporate Governance (CGG) on company performance. The principles of good corporate governance include principles that are implemented in the programs implemented by BPS, such as surveys and data presentation. To meet these basic statistical needs, BPS has carried out the 2020 Population Census as well as several surveys and data collection including Survey Industri Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Large/Medium Industry Survey, Construction Survey, Tourism Services Sector Survey, Forestry Company Survey, Plantation Company Survey, Tile Food Crops Survey, KSA and other surveys. The results showed that the implementation of GCG had an effect on the company's performance. Higher corporate governance can be measured by the perception of the corporate governance index, the higher the company's compliance and result in good company performance. The full implementation of GCG principles makes the implementation of the BPS program more focused and focused.

Keywords: Basic Statistical Needs, GCG, Legal Compliance, Performance Achievements

Abstrak.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, yang mana menurut Undang-undang Statistik No.16 tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyelenggarakan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem

Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPS membentuk Kantor Perwakilan BPS di setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan instansi vertikal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (CGG) terhadap kinerja perusahaan. Pada Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam program – program yang di laksanakan oleh BPS yaitu seperti survey dan penyajian data. Untuk memenuhi kebutuhan statistik dasar itu, BPS telah melaksanakan kegiatan Sensus Penduduk 2020 serta beberapa survei dan pendataan diantaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Industri Besar/Sedang, Survei Konstruksi, Survei Bidang Jasa Pariwisata, Survei Perusahaan Kehutanan, Survei Perusahaan Perkebunan, Survei Tanaman Pangan Ubinan, KSA dan survey – survey lainnya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan yang lebih tinggi dapat diukur dengan persepsi indeks corporate governance, semakin tinggi kepatuhan perusahaan dan mengakibatkan kinerja perusahaan yang baik. Penerapan prinsip GCG secara utuh, menjadikan implementasinya terhadap pelaksanaan program BPS menjadi terarah dan lebih terfokus.

Kata Kunci: Capaian Kerja, GCG, Kebutuhan Statistik dasar, Kepatuhan Hukum

PENDAHULUAN

Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. Dalam prosesnya, BPS mengumpulkan data melalui sensus, survei atau agregasi data. Setelah itu, hasil pelaksanaan operasi statistik dasar dijamin akan diterbitkan dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BPS merupakan tolak ukur bagi pemerintah dalam upaya kebijakannya untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program-program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik sehingga dapat dicapainya pembangunan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab. Selain itu, data dan informasi statistik dari BPS juga dibutuhkan oleh pihak swasta, mahasiswa dan masyarakat untuk perencanaan usaha, penelitian, kursus, publikasi dan lain-lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten Jombang merupakan salah satu badan perwakilan BPS di daerah. Tugas pokok BPS Kabupaten Jombang adalah menyediakan data statistik dasar yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan mandatnya selama lima tahun, BPS Kabupaten Jombang telah menyusun rencana aksi dan merangkumnya dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPS 2020-2024. Diharapkan kegiatan statistik yang dilakukan BPS sejalan dengan orientasi dan tujuan RPJMN 2020-2024. Telah terjadi perubahan model organisasi dalam berbagai aspek, dalam hal manajemen berubah dari organisasi terpusat menjadi organisasi

desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah menjadi Seiring organisasi menjadi lebih tangguh, kekuatan organisasi yang sebelumnya dipandang sebagai tolok ukur stabilitas organisasi kini telah bergeser ke kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan.

Faktor politik mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam hal ini institusi publik membutuhkan implementasi Good Governance. Penerapan tata kelola yang baik bertujuan untuk menciptakan keterbukaan informasi, akuntabilitas manajemen, perlakuan yang adil terhadap seluruh pegawai dalam melaksanakan kewajibannya, dan penerimaan atas hak dan kewajibannya, serta partisipasi seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Prinsip-prinsip good governance menurut LAN (2000) meliputi prinsip tanggung jawab; prinsip transparansi; prinsip kesetaraan; prinsip-prinsip supremasi hukum; prinsip keadilan; prinsip partisipasi; prinsip desentralisasi; prinsip unifikasi; prinsip profesionalisme; prinsip respon cepat; prinsip efisiensi dan efektivitas; prinsip persaingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe (2010) berkaitan dengan analisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) terhadap kinerja karyawan di bagian administrasi perusahaan rumah sakit umum yang menunjukkan transparansi, akuntabilitas, ekuitas, dan jenis keterlibatan yang tepat dan jenis kinerja karyawan yang tepat. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi ($p = 0,008$); tanggung jawab ($p = 0,000$); ekuitas ($p = 0,004$); dan engagement ($p = 0,015$) dengan kinerja karyawan. Transparansi merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang di diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Sumber data ini meliputi: (1) sumber daya manusia; (2) permasalahan yang dihadapi; dan (3) strategi untuk mengelola menjadi perusahaan yang baik. Metode Analisis yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Jombang tahun 2020. Data sumber daya manusia diperoleh dari pengambilan sampel capaian pendidikan seluruh pegawai Badan Pusat Statistik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan bisa memberikan hasil yg aporisma terutama dalam bidang statistik agar penyajian data yg diberikan sinkron dengan permintaan. Badan pusat Statistik dapat menaikkan pelayanan info dan penyampaian data melalui laporan kinerja yg dibuat selama 1 tahun terakhir. galat satu hal yang bisa dilakukan yaitu tanggung jawab social perusahaan. Siallagan serta Machfoedz (2003) kepemilikan mekanisme rapikan kelola perusahaan yang terdiri asal kepemilikan manajerial, dewan komisaris, serta komite audit secara statistic berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Mekanisme good corporate governance diyakini bisa meminimalisir terjadinya agency persoalan. Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi-nya mengatakan bahwa agency problem timbul sebab adanya disparitas kepentingan antara pemilik perusahaan (Principal) menggunakan manajemen (Agent). berdasarkan Al-Faki (2006), untuk memunculkan keselarasan antara pemilik perusahaan serta manajemen, diperlukan transparansi asal pihak manajemen pada pemilik perusahaan, dan keadilan kepada stakeholders lain. dalam panduan awam Good Corporate Governance Indonesia disebutkan terdapat lima asas good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas ini membantu perusahaan buat meminimalisir adanya agency problem, sebagai akibatnya kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Penerapan mekanisme good corporate governance pada perusahaan tidak semudah memahami konsepnya. penyimpangan masih bisa timbul akibat tidak adanya integritas berasal manajemen perusahaan. Timbulnya ketidak taatan, kesalah pahaman, pertarungan kiprah, serta fungsi pengambilan keputusan diantara pengelola perusahaan, dan bahkan manipulasi keuangan sang pihak direksi juga manajer ialah penyimpangan yang bisa ada dalam proses penerapan. Keberhasilan penerapan corporate governance tak hanya bergantung di prinsip dan peraturan yang terdapat, melainkan bergantung di integritas dan kualitas sumber daya insan yg terdapat pada perusahaan. Etika serta budaya kerja, dan prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting pada penerapan corporate governance (Rini, 2012)

Kinerja Badan pusat Statistik Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh banyak sekali factor antara lain asal daya manusia pada melakukan kegiatan prioritas BPS. menjadi badan penyedia data maka BPS melakukan berita umum pendidikan karyawan yang bekerja supaya fungsi dan tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik. konflik yg dihadapi BPS selama tahun 2020 diantaranya: (1) pandemic covid-19 yang membuat pelaksanaan kegiatan terkendala; (2) pembatasan pertemuan tatap muka selama pandemic; (3) kebutuhan terhadap jenis data dan informasi di wilayah kecil belum terpenuhi; (4) kebijakan pengolahan masih berdiri sendiri; dan (5) permasalahan yang terakhir yaitu kebutuhan SDM.

Buat mengatasi aneka macam permasalahan yang ada, maka BPS melakukan berita umum terhadap sdm agar terbentuk Good Corporate Governance. BPS pula melakukan banyak sekali kebijakan untuk menaikkan penyajian data antara lain peningkatan ketersediaan data serta informasi yg berkualitas, peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data serta isu statistik kepada rakyat, peningkatan kemudahan serta kecepatan akses terhadap data dan gosip statistic BPS, pemenuhan sarana serta prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistic, penciptaan iklim yg kondusif buat koordinasi serta kerjasama pada penyelenggaraan SSN, penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan info, advokasi serta pengenalan banyak sekali regulasi terkait aktivitas statistic, penyelarasan aktivitas yg terkait menggunakan Reformasi Birokrasi BPS khususnya yg terkait dengan system manajemen sdm aparatur, supervisi, akuntabilitas kinerja.

Untuk mengetahui akuntabilitas serta keberhasilan dan kegagalan aplikasi kegiatan di suatu instansi/organisasi perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi menjadi tolak ukur evaluasi kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Akuntabilitas kinerja Badan sentra Statistik Kabupaten Jombang Tahun 2020 ialah perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Jombang buat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan acara dan aktivitas BPS Kabupaten Jombang pada mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2020, akuntabilitas pelaksanaan tugas serta fungsi disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian

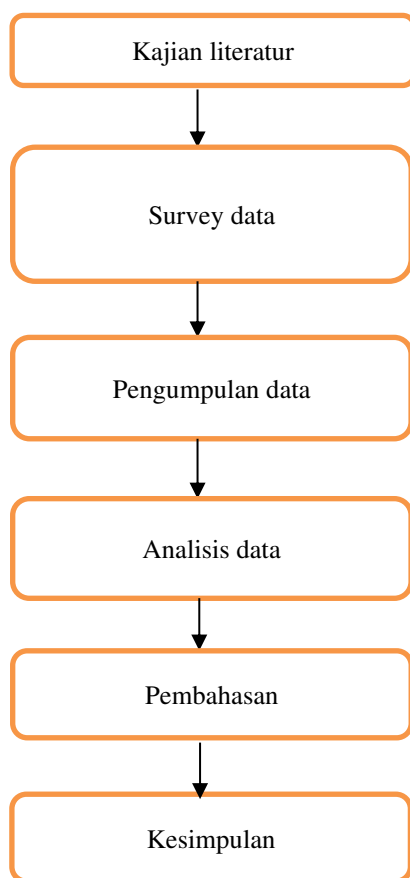
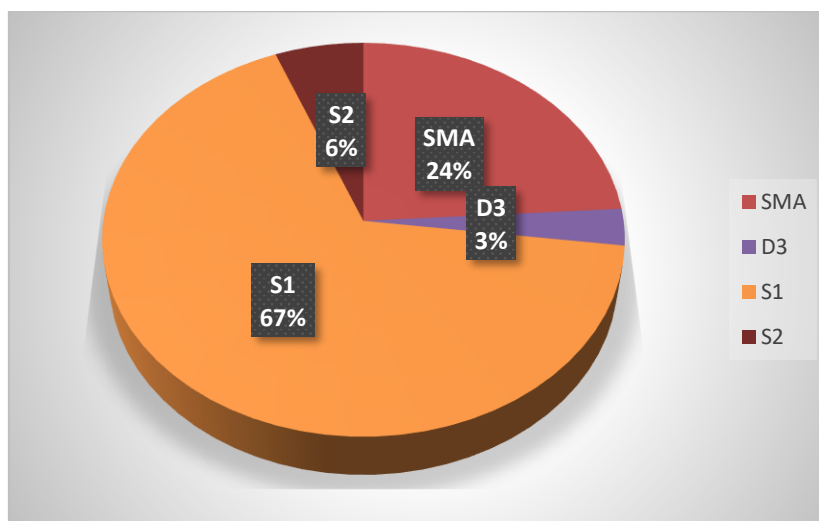


Diagram alur diatas ialah proses menerima data dari penelitian hubungan Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan : studi masalah di Badan pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang. Hal pertama yg dilakukan artinya kajian literatur mengenai good corporate governance lalu dilakukan pengumpulan data berdasarkan laporan kinerja Badan sentra Statistik Kabupaten Jombang tahun 2020. sehabis semua data terkumpul maka dilakukan analisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif agar data yang tersedia simpel dipahami. Pembahasan terkait data yg telah dianalisis dilakukan secara deskriptif kemudian disimpulkan buat mencari inti dari penelitian.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada akhir tahun 2020 BPS Kabupaten Jombang memiliki kekuatan SDM sebanyak 31 pegawai dengan kualitas SDM relatif cukup baik tercermin dari tingkat pendidikan setara magister sebanyak 6% (2 orang), sarjana/diploma IV 67% (22 orang), sarjana muda/D3 sebanyak 3% (1 orang), dan SMA 24% (6 orang).

Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Jombang Menurut Pendidikan Tahun 2020 (%)



Sedangkan menurut posisi jabatan, BPS Kabupaten Jombang memiliki 2 (dua) pejabat struktural dengan komposisi 1 (satu) orang Pejabat Eselon III, 1 (satu) orang Pejabat Eselon IV dan sisanya merupakan pejabat fungsional statistisi dan fungsional umum. Secara rinci profil pegawai BPS Kabupaten Jombang sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Jombang Menurut Jabatan Tahun 2020

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Pejabat structural	2	6,45%
2.	Pejabat Fungsional Statisti dan Pranata Komputer	23	74,19%
3.	Pejabat Fungsional Umum	6	19,35%
	Jumlah	31	100%

Tabel 2. Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Jombang Menurut Golongan Tahun 2020

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
IV	2	6,45%
III	28	90,32%
II	1	3,23%
I	-	-
Jumlah	31	100

Tabel 3. Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Jombang Menurut Usia Tahun 2020

Usia	Jumlah (orang)	Persentase
>50	10	32,26%
41-50	12	38,71%
31-40	9	29,03%
<=30	-	-
Jumlah	31	100

Berdasarkan komposisi pegawai BPS menurut jabatan sudah dapat memenuhi tata kelola perusahaan yang baik. Pejabat struktural terdapat 2 orang, pejabat fungsional statistisi dan pranata computer 23 orang, serta pejabat fungsional umum terdapat 6 orang.

Berdasarkan komposisi menurut usia ternyata masih banyak pegawai yang berusia 40-50 tahun sebanyak 22 orang. Faktor usia pada pegawai ini bisa mempengaruhi kinerja Badan Pusat Statistik dalam penyediaan data dan informasi, dari segi social media, usia ini mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional aplikasi maupun website yang dimiliki BPS.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan BPS No 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, susunan organisasi BPS Kabupaten Jombang terdiri dari:

Kepala. Kepala BPS Kabupaten Jombang mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas dan fungsi serta membina aparaturnya agar berdaya guna dan berhasil guna.

Subbagian Umum. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, urusan kepegawaian dan keuangan serta urusan lainnya yang menjadi tanggung jawab subbagian Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional yang ada di BPS Kabupaten Jombang tahun 2020 adalah Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer. Selain itu, dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan, Jabatan Kepala Seksi dirubah menjadi Jabatan Fungsional yang menjalankan tugas manajerial di masing-masing fungsinya, yaitu sebagai berikut:

Fungsi Statistik Produksi. Fungsi Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi, dan konstruksi.

Fungsi Statistik Distribusi. Fungsi Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa.

Fungsi Statistik Sosial. Fungsi Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan.

Secara kelembagaan, BPS Kabupaten Jombang merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia yang dinyatakan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Visi BPS Kabupaten Jombang.

Visi BPS Kabupaten Jombang adalah "Penyelenggara Statistik Dasar di Kabupaten Jombang untuk Data Statistik yang Berkualitas".

Misi BPS Kabupaten Jombang. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Jombang yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Kabupaten Jombang dirumuskan sebagai berikut: (1) menyelenggarakan Statistik Dasar di Kabupaten Jombang; (2) mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Jombang; (3) membina Instansi Pemerintahan di Kabupaten Jombang melalui SSN yang berkesinambungan; dan (4) menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain: (1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; (2) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; (3) peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; (4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan (5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

Untuk mengatasi permasalahan selama pandemic covid-19 maka Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang memaksimalkan pelayanan melalui website dan media social lainnya. Dengan demikian BPS Kabupaten Jombang dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas penyajian data melalui website. Informasi yang cepat dan akurat menjadi kebutuhan masyarakat. Penyajian data melalui infografis akan membuat data statistik lebih menarik dan mudah untuk dimengerti. Selain website, BPS Kabupaten Jombang juga memberikan beragam informasi melalui media sosial seperti facebook dan instagram. Sehingga kalangan milenial juga bisa menikmati data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Jombang.

Tujuan penerapan good corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pihak eksternal perusahaan yang meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) (Arifin, 2005).

Berbagai upaya yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Pengaruh dari good corporate governance sangat menentukan kualitas dari pelayanan yang diberikan meskipun banyak faktor lain yaitu SDM dan permasalahan yang timbul. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPS relative cukup baik dan dapat memenuhi strategi yang akan dilaksanakan serta mengatasi berbagai masalah yang terjadi.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu faktor non keuangan lainnya yang sekarang ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Tanggung jawab Sosial Perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban ekonomi dan legal (Kusumadilaga, 2010). Pertanggung jawaban sosial perusahaan melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat serta komunitas setempat. Semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, citra perusahaan juga menjadi meningkat.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Kabupaten Jombang secara berkesinambungan terus menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

SIMPULAN DAN SARAN

Good Corporate Governance sangat berpengaruh dalam kinerja suatu perusahaan. Good Corporate Governance ini menjadi tolok ukur nilai yang dimiliki suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap studi kasus Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Setelah dilakukan penelitian ternyata kurangnya penerapan good corporate governance dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Beberapa aspek internal maupun eksternal menjadi factor pendorong hasil kinerja perusahaan. SDM dan permasalahan yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang menunjukkan kurangnya penerapan good corporate governance.

Penelitian ini memuat data yang akurat sesuai dengan laporan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang tahun 2020. Berbagai faktor yang mempengaruhi Good Corporate Governance kami sajikan dalam bentuk tabel yang meliputi komposisi jabatan, golongan serta usia. Strategi peningkatan pelayanan penyediaan data informasi oleh BPS tertuang dalam artikel ini. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang juga memanfaatkan social media dalam penyelenggaraan fungsi dan tugasnya untuk memperluas jangkauan hingga kaum milenial. Visi dan misi BPS Kabupaten Jombang berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Y. (2021). THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, LIQUIDITY, AND COMPANY SIZE ON FINANCIAL DISTRESS: Empirical Study on Property & Real Estate Sub Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2015 - 2018. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)*, 1(1), 111–120. Retrieved from <https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/article/view/9>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. (2020). *Laporan Kinerja tahun 2020 BPS Kabupaten Jombang*. BPS Kabupaten Jombang.
- Izuddin, M. (2021). The Impact Analysis Of Fundamental Factors On The Return Of Construction Company Shares. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)*, 1(1), 22–30. Retrieved from <https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/article/view/5>
- Prasetyani, E., & Sofyan, M. (2020). Bankruptcy Analysis Using Altman Z-Score Model and Springate Model in Retail Trading Company Listed In Indonesia Stock Exchange. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 1(3), 139-144. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v1i3.98>
- Putri Ayu Sasmika Ida dan Bambang Suprasto H. (2016). *Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 15. 1. April. Universitas Udayana.
- Putri Kartika Rowina & Dul Muid. (2017). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 6, Nomor 3. Universitas Diponegoro

- Retno Dyah Reny M. & Denies Priantinah (2012). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)*. Jurnal Nominal. Volume 1. Nomor 1.
- Rini, Tety Sulestiyo. 2012. *Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Siallagan, Hamonangan dan Machfoedz, Mas'ud. 2006. *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Widagdo Octavianto Kresno Dominikus dan Anis Chariri. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 3. Nomor 3. Universitas Diponegoro.